

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan lahir memiliki perbedaan. Tidak ada manusia yang sama meskipun terlahir kembar sekalipun tetap ada perbedaannya. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari fisiknya maupun dari sifatnya, seperti warna kulit, rambut, fisik, kecerdasan dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Setiap orang memiliki hak asasi manusia, tidak hanya yang non disabilitas akan tetapi orang yang disabilitas juga mendapatkannya.<sup>2</sup> Hal tersebut menandakan bahwa hak asasi manusia bersifat menyeluruh bagi warga Negara Indonesia.

Pada dasarnya, penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas. Penyandang cacat dapat dimaknai dengan konotasi negatif yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia serta bertolak belakang nilai luhur bangsa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup> Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki gangguan pada gerak tubuh seperti tulang otot dan kesendian yang tidak bisa melakukan kegiatan sesuai orang normal pada umumnya.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak kewajiban yang sama dengan masyarakat Indonesia yang non disabilitas. Masyarakat pada umumnya menginginkan kondisi yang sempurna dalam kehidupannya.<sup>5</sup> Kehidupan tersebut mendiskripsikan kehidupan yang semua kebutuhannya terpenuhi serta tidak diwarnai kekhawatiran dimasa yang akan datang, kehidupan yang mewujudkan hubungan dengan keadilan.<sup>6</sup> Pada

---

<sup>1</sup> Lorentius Goa, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Balai Latihan Kerja Bhakti Luhur", *JPP*, 1 No.1, (2020). 41

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa Ke Masa*, (Jakarta :ELSAM, 2007). 1

<sup>3</sup> Anas Pattaray, *Konsep Pelayanan Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas*, (Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2021) 1,2

<sup>4</sup> Metra Naibaho, "Program Rehabilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang" *PROSIDING KS : Riset & PKM*, 2 No.3,(2019). 331

<sup>5</sup> Ledia Hanifa Amalia, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta: beebooks, 2016). 8

<sup>6</sup> Ledia Hanifa Amalia, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta: beebooks, 2016). 8

umumnya, masyarakat menginginkan kondisi tubuh yang sempurna sesuai dengan tatana yang di inginkan. Keadaan ini mendeskripsikan mengenai kehidupan yang didalamnya terdapat beragam kebutuhan yang bisa dipenuhi dan tidak adanya rasa khawatir dalam menjalani hari esok, kehidupan yang memiliki iklim yang kondusif yang bermanfaat dalam mengaktualisasikan diri dan mewujudkan hubungan yang saling memiliki keadilan.<sup>7</sup>

UU Nomer 8 tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas, bagian 11 membahas hak koperasi, kewirausahaan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hak yang diperoleh meliputi pertama, mendapatkan pekerjaan yang di adakan oleh Pemerintah. Kedua, mendapatkan upah sesuai dengan non penyandang disabilitas. Ketiga, mendapatkan fasilitas yang layak. Hak tersebut didapatkan oleh penyandang disabilitas yang mana mereka merasa bahwa dirinya mendapatkan diskriminasi<sup>8</sup>

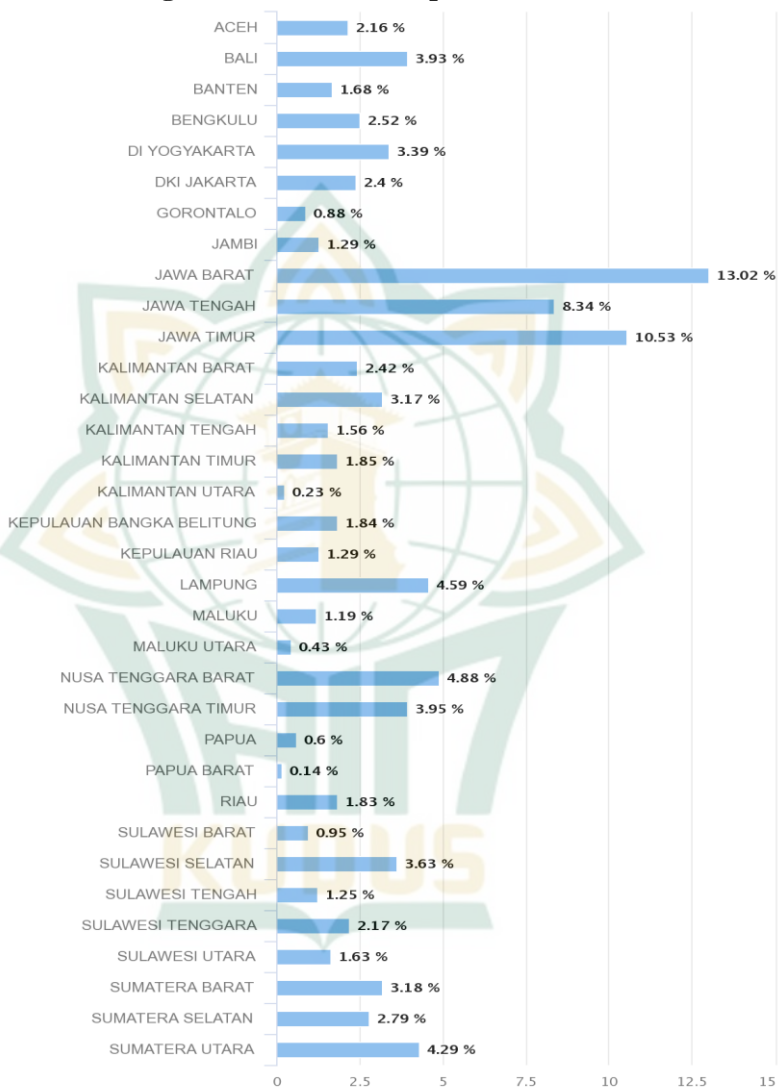
Berikut merupakan data orang difabel di Indonesia menurut daerah pada Tabel 1 , umur pada Tabel 2, ragam disabilitas pada Tabel

---

<sup>7</sup> Soetomo, *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012). 1

<sup>8</sup> Lorentius Goa, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Balai Latihan Kerja Bhakti Luhur". 40

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Orang Difabel Menurut Tipe Daerah Tahun 2021**



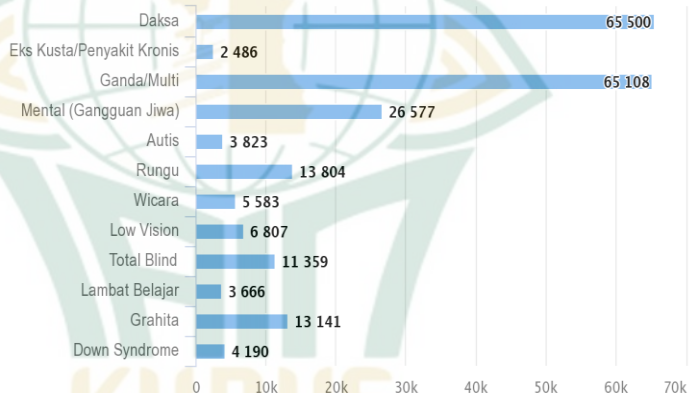
**Sumber Data : Kementerian Sosial RI**

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Orang Difabel Menurut Umur Tahun 2021**

Umur	Jumlah
0 – 5 tahun	1.5%
6 – 18 tahun	27.3%
19 – 30 tahun	23.4%
41 – 50 tahun	19.0%
>50 tahun	28.8%

**Sumber Data : Kementerian Sosial RI**

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Orang Difabel Menurut Gangguan atau Ragam Tahun 2021**



**Sumber Data : Kementerian Sosial RI<sup>9</sup>**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk paling banyak penyandang disabilitas yaitu daerah jawa barat dengan persentase 13.02% dan kebanyakan penyandang disabilitas berumur 50 tahun lebih, untuk ragam disabilitasnya yaitu daksa dengan jumlah 65500. Masyarakat menganggap orang difabel menyusahkan orang lain padahal mereka memiliki bakat melebihi orang normal serta dapat mengangkat derajat dibandingkan dengan orang non disabilitas. Hikmah yang dapat diambil yaitu jangan pernah merendahkan seseorang hanya karna mereka penyandang disabilitas yang katanya hanya menyusahkan

<sup>9</sup> Kementerian Sosial RI, “Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas,” accessed November 22, 2021 <https://simpd.kemensos.go.id/>

orang lain. Harusnya orang normal bisa mengambil pembelajaran dari orang disabilitas serta bisa dijadikan sebagai motivasi.

Masyarakat dengan kelas ekonomi yang rendah, penyandang disabilitas, usia lanjut, wanita dan etnis minoritas merupakan orang yang tidak berdaya yang selalu mendapatkan diskriminasi.<sup>10</sup> Penyandang disabilitas khususnya ialah bagian yang takterpisahkan dari masyarakat, serta mendapatkan kewajiban dan hak yang serupa dalam sendi-sendi kehidupan baik dari pendidikan, pekerjaan, komunikasi dan lain sebagainya. Mereka wajib mendapatkan kehidupan yang baik layaknya manusia normal lainnya.<sup>11</sup>

UU No.4 tahun 1997 Pasal 1 Bab 1 dan Undang-undang No. 23 tahun 2003 menyimpulkan bahwasannya seluruh warga negara memperoleh perlindungan tana harus membedakan warga negaranya, hal ini berarti bahwa hak perlindungan didapatkan semua warga negara tanpa membeda bedakan seperti orang disabilitas juga mendapatkan perlindungan dari Negara. Penyandang difabel adalah orang yang fisiknya memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya.<sup>12</sup>

Kecacatan fisik diakibatkan gangguan bicara, tubuh, penglihatan dan pendengaran. Adapun cacat mental disebabkan karena bawaan sejak lahir, kecelakaan dan sakit.<sup>13</sup> Manusia memiliki peran dalam meningkatkan kehidupannya maupun memanfaatkan lingkungan sekitar.<sup>14</sup>

Pemberdayaan merujuk pada kebebasan (*freedom*) yang dimiliki orang dengan kemampuan dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya, hal ini dapat diartikan bahwa tidak hanya kebebasan berpendapat akan tetapi kebebasan dari kesakitan, kebodohan dan kelaparan yang dapat mengenai beragam sumber yang bisa meningkatkan pendapatan, mendapatkan barang dan jasa untuk kebutuhannya serta ikut berpartisipasi dalam

---

<sup>10</sup> Edi Suharto, *Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Rifka Aditama, 2005). 60-61

<sup>11</sup> Teti Ati Padmi “Impelementasi Aksebilitas Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus Bagi Penyandang Cacat di Kota Semarang”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 2, No.4, (2006). 66

<sup>12</sup> Metra Naibaho, “Program Rehabilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di PantI Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang”. 331-332

<sup>13</sup> Teti Ati Padmi “Impelementasi Aksebilitas Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus Bagi Penyandang Cacat di Kota Semarang”. 65

<sup>14</sup> Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, ( Bandung: CV. Alfabeta, 2007). 7

membangun keputusan yang dapat mempengaruhi mereka.<sup>15</sup> Pemberdayaan lebih menekankan kepada orang yang memiliki kekuasaan, pengetahuan dan keterampilan yang mampu memberikan pengaruh kepada kehidupan diri sendiri dan lainnya agar menjadi lebih baik.<sup>16</sup>

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang pemberdayaan masyarakat disabilitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Theresia Baturangka pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat disabilitas hanya sebatas pemberian paket bantuan sosial.<sup>17</sup> Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurul Syobah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa adanya dampak yang baik setelah dijalankannya pelatihan-pelatihan, peserta pelatihan memiliki peningkatan kemampuan dalam berjualan online.<sup>18</sup> Dan menurut penelitian dari Siti Aesah dkk pada tahun 2020 menunjukan bahwa Peran pemerintah ini hanya sebagai pemberi modal saja sedang untuk pelaksanaannya di serahkan ke Dinas Sosial. Jadi, apabila difabel mengalami masalah modal dan alat-alat kerja pemerintah dan Dinas Sosial siap memberikan bantuan. Dalam pelatihan yang telah disajikan dimana terdapat beberapa kegagalan didalamnya dimana difabel kurang terampil dimana sampai pelatihan berakhir masih dibutuhkan bimbingan lanjutan untuk difabel.<sup>19</sup>

Kasus penyandang disabilitas di Kudus dalam memberdayakannya dengan menjadikan mereka mandiri serta memaksimalkan potensi dan kreativitasnya untuk mengangkat derajatnya. Tempat untuk memberdayakan atau untuk menyalurkan idenya yaitu di Forum Komunikasi Disabilitas

---

<sup>15</sup> Halim Budi Santoso, , “Pemberdayaan Kewirausahaan Basis Teknologi Informasi Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, No. 1, (2021). 2

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. 59

<sup>17</sup> Theresia Baturangka, “Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3, No. 3 (2019).

<sup>18</sup> Nurul Syobah, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kalimantan Timur” *Nuansa*, 15, No. 2 , (2018).

<sup>19</sup> Siti Aesah,dkk “Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat ”, *Jurnal Manajemen*, 14, No.2, (2020).

Kudus yang memiliki jumlah anggota lebih dari seratus orang. Penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus tergolong masih terdiskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Perusahaan di Kabupaten Kudus melakukan penolakan dengan cara tidak menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bergabung. Oleh karenanya di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus para penyandang disabilitas diberikan motivasi, pelatihan-pelatihan sesuai kemampuannya untuk bisa mengembangkan dan membangun usaha agar mendapatkan penghasilan sendiri, adapun pelatihannya yaitu pelatihan tata boga, pelatihan penjahitan, pelatihan administrasi dan jual beli online dari Menpora. Forum Komunikasi Disabilitas Kudus juga mengadakan kegiatan rutinitas setiap hari jumat yaitu memberikan bantuan kepada anggota disabilitas yang berat untuk di kasih sumbangan.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui usaha mikro kecil menengah, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membantu perubahan dari masyarakat yang tidak memiliki daya menjadi masyarakat yang memiliki kehidupan yang baik (masyarakat yang berdaya). Maka dari itu, muncullah Forum Komunikasi Disabilitas Kudus yang dapat memberdayakan orang disabilitas melalui program-programnya khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia serta membangun kemandirian yang bergantung pada orang lain dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka skripsi ini berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Melalui Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Forum Komunikasi Disabilitas Kudus)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini memuat tentang pertanyaan mengenai pemberdayaan UMKM penyandang disabilitas. Pembahasan ini lebih difokuskan pada Pemberdayaan

---

<sup>20</sup> Richma Hidayati, “Pendamping Pembuatan Kreasi Eceng Gondok pada Anggota Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK)”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11, No.1, (2020). 2

Masyarakat Disabilitas Melalui Usaha Mikro Kecil di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.

### **C. Rumusan Masalah**

Melalui latar permasalahan yang sudah diberikan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana program pelatihan Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam memberdayakan penyandang disabilitas?
2. Bagaimana efektivitas pemberdayaan masyarakat disabilitas yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Disabilitas Kudus ?
3. Bagaimana pemetaan peluang kerja bagi penyandang disabilitas?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian akan memiliki nilai jika penelitiannya mempunyai tujuan yang baik. Peneliti sudah memaparkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui program pelatihan Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam memberdayakan penyandang disabilitas
2. Untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan masyarakat disabilitas yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Disabilitas Kudus
3. Untuk mengetahui pemetaan peluang kerja bagi penyandang disabilitas

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas, hasil penelitian ini mampu memberikan kemanfaatan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan baik praktis maupun teoritis. Manfaat penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis
 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang ekonomi serta bidang kecacatan.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Bagi pembaca
 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembaca atau peneliti lainnya mengenai pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui UMKM. serta dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya



dengan memberikan tambahan permasalahan lainnya yang sesuai dengan tema.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam menangani permasalahan disabilitas serta dapat menjadi bahan penyusunan mengambil keputusan kebijakan di masa yang akan datang, khususnya dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas.

## F. Sistematika Penulisan

Tujuan diberikannya sistematika penulisan ini yaitu demi mendapatkan gambaran mengenai komponen yang berkaitan sehingga akan didapatkan penelitian yang ilmiah dan sistematis. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri : “halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.”

2. Bagian Isi, meliputi :

Bagian isi terdiri dari penjelasan mengenai lima bab utama yang digunakan dalam menjelaskan inti penelitian yaitu:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini mencakup “latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.”

**BAB II : Landasan Teori**

Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian pemberdayaan, tujuan pemberdayaan, indikator pemberdayaan, tahap pemberdayaan, pengertian disabilitas, pengertian UMKM, ruang lingkup UMKM

**BAB III : Temuan Penelitian**

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yakni terdiri dari profile, visi, dan misi, struktur organisasi FKDK, maksud dan tujuan didirikannya FKDK,

sumber dana, prestasi, jadwal kegiatan, sarana dan prasarana

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini dijelaskan tentang temuan lapangan beserta dengan pembahasannya

**BAB V : Penutup**

Bagian ini akan menjelaskan mengenai simpulan dan saran yang diberikan kepada subyek penelitian.

